



# PROFIL KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA PALANGKA RAYA

**2017**

PEMERINTAH KORA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut KM 5,5 No.98  
Telp. (0536) 3231267  
<https://palangkaraya.go.id/>

**PROFIL KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Profil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya Tahun 2017 ini adalah merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. Publikasi ini menyajikan perkembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya, yang mencakup berbagai ragam informasi/indikator tentang perubahan dan pencapaian perkembangan taraf kesejahteraan di Kota Palangka Raya, sehingga hal ini dapat diketahui dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman dari pengolahan beberapa data yang bersumber dari BPS maupun luar BPS (data sekunder). Adapun bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup antara lain Kependudukan dan KB, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perumahan.

Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam penentuan kebijakan maupun penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikas ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan edisi berikutnya sangat diharapkan.

Palangka Raya, Desember 2018

**Kepala Bappeda Kota Palangka Raya  
Selaku Penanggung Jawab**



**H. Akhmad Fordiansyah, S.H., M.A.P**  
NIP. 19641121 198503 1 008

**Kepala BPS Kota Palangka Raya  
Selaku Ketua Tim Penyusun**



**Agie, SH, M.Hum**  
NIP. 19631011 198403 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I_GAMBARAN .....	1
BAB II_KEPENDUDUKAN .....	3
2.1 Komposisi Penduduk.....	3
2.2 Pertumbuhan Penduduk.....	6
2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	7
2.4 Pengendalian Jumlah Penduduk.....	9
BAB III_PENDIDIKAN .....	12
3.1 Rasio Murid-Guru.....	12
3.2 Partisipasi Sekolah .....	13
3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	14
3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	15
3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) .....	16
3.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	16
3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) .....	18
3.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	19
3.6 Kemampuan Membaca dan Menulis.....	20
BAB IV_KESEHATAN .....	22
4.1 Angka Kesakitan (Morbiditas).....	22
4.2 Penduduk Berobat .....	22
4.3 ASI dan Imunisasi .....	25
4.4 Kebiasaan Merokok .....	26
4.5 Angka Harapan Hidup .....	27
BAB V_KETENAGAKERJAAN .....	29
5.1 Penduduk Usia Kerja .....	29
5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	30
5.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	31
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha .....	33
5.5 Upah Minimum Kota (UMK) .....	35

BAB VI PERUMAHAN .....	37
6.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal .....	37
6.2 Komponen Perumahan .....	39
6.3 Kepemilikan Aset .....	46
BAB VII PENGELUARAN KONSUMSI DAN KEMISKINAN .....	47
7.1 Pengeluaran Konsumsi.....	47
7.2 Kemiskinan.....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2017 .....	3
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	4
Tabel 2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Palangka Raya menurut Kecamatan, Tahun 2017 .....	5
Tabel 2.4 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	8
Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Pendidikan dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2017 .....	10
Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2017 .....	11
Tabel 3.1 Perkembangan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2017/2018 .....	13
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 5 -18 Tahun menurut Golongan Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017 .....	14
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017 .....	15
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017 .....	16
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, Tahun 2017 .....	17
Tabel 3.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Tahun 2017 .....	20
Tabel 4.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Palangka Raya, Tahun 2014-2017 .....	23
Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Palangka Raya Tahun 2014-2016 (Persen) .....	23
Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Palangka Raya, Tahun 2017 .....	24
Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun menurut Kutil Pengeluaran dan Rata-rata Lama Rawat Inap, 2017 .....	24
Tabel 4.5 Persentase Anak Usia kurang dari 2 tahun yang Pernah Disusui, dan lamanya Disusui, Palangka Raya 2014-2017 .....	25
Tabel 4.6 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi di Palangka Raya Tahun 2015-2017 .....	26
Tabel 4.7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Golongan Pengeluaran, 2017 .....	27
Tabel 5.1 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2015 dan 2017 .....	29
Tabel 5.2 Persentase TKK dan TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2017 .....	32

Tabel 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	34
Tabel 5.4 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (Rupiah) Penduduk Palangka Raya Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Tahun 2015 dan 2017 .....	36
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas Tahun 2017 .....	40
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	41
Tabel 6.3 Persentase Perumahan Berdasarkan Luas Lantai di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	41
Tabel 6.4 Persentase Perumahan Berdasarkan Fasilitas Jamban di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	43
Tabel 6.5 Persentase Perumahan Berdasarkan Jenis Kloset Kota Palangka Raya Tahun 2017	44
Tabel 6.6 Persentase Perumahan Berdasarkan Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	45
Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Aset di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	45
Tabel 7.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kuantil Pengeluaran, Tahun 2017 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	5
Gambar 2.2	Pertumbuhan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 s.d 2017 .....	7
Gambar 2.3	Persentase Wanita Usia 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Palangka Raya, Tahun 2017 .....	9
Gambar 3.1	Harapan Lama Sekolah di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017.....	18
Gambar 3.2	Rata-rata Lama Sekolah di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017.....	19
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013 s.d 2017.....	28
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	30
Gambar 5.2	Perkembangan TPAK Kota Palangka Raya Tahun 2012 s.d 2017 .....	31
Gambar 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Palangka Raya Tahun 2015 dan 2017 .....	33
Gambar 5.4	Perkembangan UMK Kota Palangka Raya, Tahun 2014 s.d 2018 .....	35
Gambar 6.1	Status Penguasaan Tempat Tinggal, di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	38
Gambar 6.2	Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	38
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap di Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	39
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, Kota Palangka Raya Tahun 2017 .....	42
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2017 .....	44
Gambar 7.1	Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 .....	48

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

Pembangunan nasional maupun daerah yang telah direncanakan dan masih dilaksanakan secara berkesinambungan (*sustainable development*) oleh pemerintah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Istilah kesejahteraan yang dimaksud sebenarnya mempunyai makna dan pengertian serta mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas yang tidak semuanya dapat diukur, karena pada dasarnya kesejahteraan tidak saja menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material tetapi juga bersifat batiniah atau spiritual. Begitu luasnya aspek-aspek yang tercakup dalam makna atau istilah kesejahteraan tersebut sehingga data statistik yang konvensional, seperti pendapatan per kapita sangatlah tidak memadai untuk menampung makna kesejahteraan yang dimaksud. Meningkatkan pendapatan per kapita sudah tentu merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi hal demikian belum memadai untuk membangun manusia seutuhnya, suatu istilah yang secara jelas menggambarkan luasnya muatan kesejahteraan dan tingkat taraf hidup suatu masyarakat.

Kesejahteraan rakyat di suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa variabel dan informasi penting mengenai kependudukan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam publikasi ini akan difokuskan dan dibatasi pada lima aspek yaitu kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Informasi yang disajikan bersumber dari hasil data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS), survei-survei lain BPS, dan juga beberapa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Indikator kependudukan Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat sebesar 2,95 persen. Komposisi penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,98. Jadi, bila terdapat 100 orang perempuan di Kota Palangka Raya, maka jumlah laki-laki berkisar antara 104 hingga 105 orang.

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Palangka Raya pada tahun 2016 sebesar 11,03 tahun atau setara kelas 2 SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menikmati program wajib belajar 9 tahun. Untuk penduduk

berumur lebih dari 15 tahun sebesar 29,15 persen memiliki ijazah SMA, 21,93 persen memiliki ijazah SMP/MTS dan 20,12 persen memiliki ijazah SD/MI.

Dari sisi kesehatan, sekitar 28,33 persen penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Praktek Dokter/Bidan menjadi tempat berobat utama dalam hal pengobatan pada tahun 2017, yaitu sebanyak 30,52 persen. Sebesar 71,67 persen dari penduduk yang mengalami gangguan kesehatan tidak berobat jalan karena mengobati sendiri (83,13 persen), merasa tidak perlu (14,36 persen), tidak punya biaya berobat (1,64 persen), tidak ada biaya transport (0,38 persen), waktu tunggu pelayanan lama (0,24 persen), dan lainnya (0,25 persen). Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palangka Raya relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan, mulai tahun 2016 mencapai AHH Kota Palangka Raya 73 tahun lebih, sedangkan AHH Kalimantan Tengah secara keseluruhan masih di bawah 70 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017 sebesar 7,26 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 dengan TPT sebesar 6,30. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Palangka Raya menggeliat. Hal ini di tandai dengan banyaknya pencari kerja yang datang ke Palangka Raya. Di sisi lain, lapangan usaha baru belum mampu mengimbangi peningkatan angkatan kerja.

Berdasarkan variabel perumahan, rumah tangga yang mendiami rumah milik sendiri mencapai 55,63 persen. Dari rumah dengan status milik sendiri, 73 persen di antaranya telah memiliki sertifikat SHM atas nama anggota rumah tangganya. Dinding terluas yang dipakai adalah tembok dan kayu. Untuk jenis lantai, sebagian besar menggunakan bahan keramik dan kayu. Untuk sumber air minum, mayoritas penduduk Kota Palangka Raya menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum. Untuk aset, sepeda motor mungkin dapat dikategorikan bukan barang mewah lagi karena sebanyak 90,12 persen rumah tangga telah memiliki sepeda motor.

## BAB II KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah salah satu indikator kesejahteraan di dalam suatu wilayah. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan jika disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang handal. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang handal hanya akan menjadi beban bagi pembangunan, terlebih jika distribusinya secara geografis tidak merata. Oleh karena itu, informasi tentang komponen-komponen kependudukan seperti: jumlah, komposisi dan distribusi penduduk perlu diketahui sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

**Tabel 2.1 Indikator Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2017**

URAIAN	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	259 865	267 757	275 667
Pertumbuhan Penduduk (%)	3,08	3,04	2,95
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	91	94	97
Jumlah Laki-laki (Jiwa)	132 980	137 057	141 179
Jumlah Perempuan (Jiwa)	126 885	130 700	134 488
Rasio Jenis Kelamin (%)	104,80	104,86	104,98
Rasio Ketergantungan	39,41	38,86	38,38

Sumber : Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

### 2.1 Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah sebesar 275.667 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 2,95 persen dari tahun 2016 yang berjumlah 267.757 jiwa. Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 141.179 jiwa (51,21 persen) dan penduduk perempuan berjumlah 134.488 jiwa (48,79 persen).

Berdasarkan Tabel 2.2, Kecamatan Jekan Raya tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 143.508 jiwa (52 persen) dan Kecamatan Rakumpit memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 3.475 jiwa (1,26 persen).

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017**

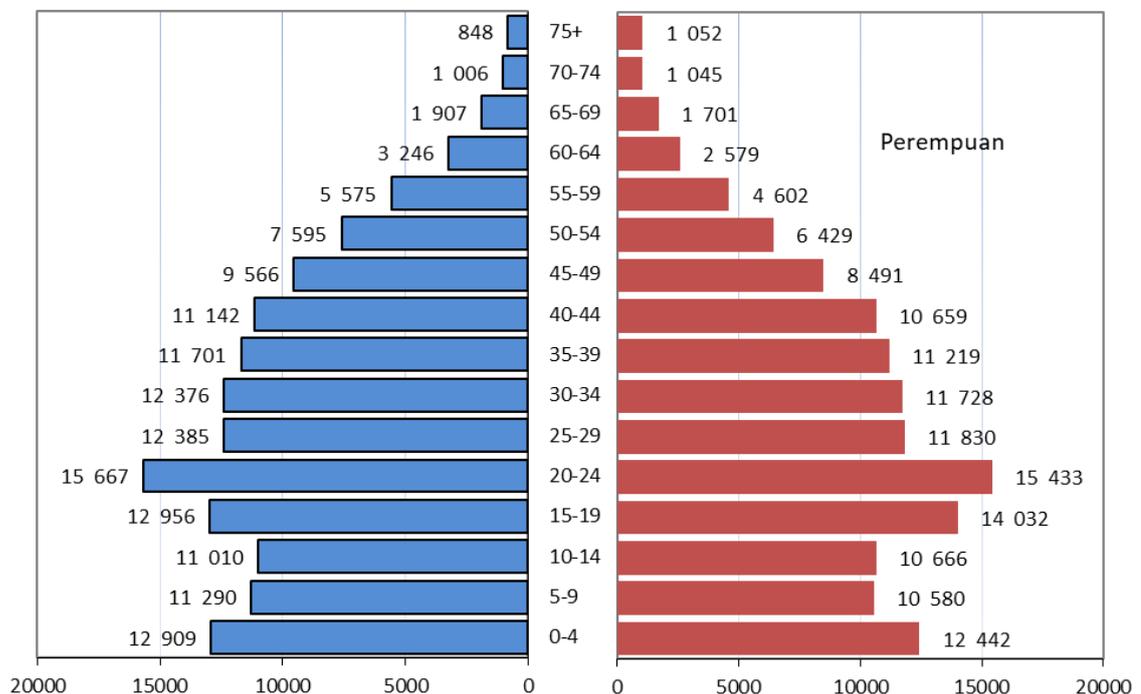
Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pahandut	49 418	47 305	96 723	<b>104,47</b>
Sabangau	9 303	8 619	17 922	<b>107,94</b>
Jekan Raya	73 311	70 197	143 508	<b>104,44</b>
Bukit Batu	7 306	6 733	14 039	<b>108,51</b>
Rakumpit	1 841	1 634	3 475	<b>112,67</b>
<b>Palangka Raya</b>	<b>141 179</b>	<b>134 488</b>	<b>275 667</b>	<b>104,98</b>

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada usia 15 sampai dengan 64 tahun sedangkan usia non produktif adalah penduduk yang berada pada usia kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun. Banyaknya penduduk usia produktif dapat menggambarkan besarnya potensi angkatan kerja yang dapat diperoleh dalam suatu wilayah. Persentase penduduk usia produktif (15—64 tahun) di Kota Palangka Raya tahun 2017 adalah 72,26 persen sementara untuk penduduk usia non produktif adalah sebesar 27,74 persen.

Jumlah penduduk usia produktif dan non produktif menentukan angka ketergantungan atau *dependency ratio* di suatu wilayah. Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa angka ketergantungan penduduk adalah sebesar 38,38 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 38 s.d 39 orang usia non produktif. Dengan perkataan lain, saat ini Palangka Raya sedang menikmati bonus demografi.

**Tabel 2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Palangka Raya menurut Kecamatan, Tahun 2017**

Kecamatan	0-14	15-64	65+	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pahandut	24 700	69 340	2 683	39,49
Sabangau	5 157	12 132	633	47,73
Jekan Raya	33 972	105 943	3 593	35,46
Bukit Batu	3 930	9 560	549	46,85
Rakumpit	1 138	2 236	101	55,41
<b>Palangka Raya</b>	<b>68 897</b>	<b>199 211</b>	<b>7 559</b>	<b>38,38</b>



**Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Kelompok umur 20 s.d 24 tahun merupakan kelompok umur dengan penduduk paling banyak di Kota Palangka Raya tahun 2017. Hal ini dimungkinkan karena Palangka Raya adalah salah satu kota tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

perguruan tinggi dan juga tujuan mencari pekerjaan dari kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk adalah cara penyajian lain dari struktur umur penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan menurut umur. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.

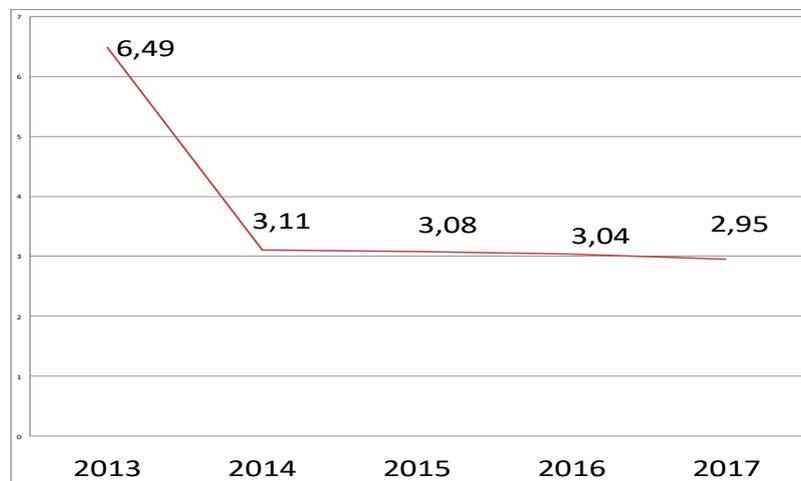
Dilihat dari piramida penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017, alas pada kelompok umur 0-4 tahun lebih lebar dibanding kelompok umur 5-9 tahun. Ini berarti dalam kurun waktu 4 tahun terakhir angka kelahiran Kota Palangka Raya meningkat. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa struktur penduduk Kota Palangka Raya tergolong dalam struktur penduduk muda. Kelompok umur 20-24 tahun mempunyai alas paling lebar dan makin ke atas makin mengerucut. Semakin ke atas, alas semakin mengecil. Hal ini berarti bahwa penduduk yang tergolong ke umur tua semakin sedikit.

## **2.2 Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang. Kelahiran dan perpindahan penduduk (migrasi masuk) di suatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian dan perpindahan penduduk (migrasi keluar) menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Selain faktor demografi, secara tidak langsung pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non demografi. Faktor non demografi yang penting ialah kesehatan dan pendidikan. Pengaruh kesehatan dalam pertumbuhan penduduk terlihat dari jumlah kematian. Semakin maju tingkatan kesehatan, maka jumlah kematian menurun yang selanjutnya dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk besar, apabila jumlah kelahiran besar.

Pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2017 adalah sebesar 2,95 persen. Terjadi pertumbuhan penduduk, tetapi laju pertumbuhan melambat jika dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya adalah sebesar 3,04 persen.



**Gambar 2.2** Pertumbuhan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 s.d 2017

### 2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran yang tidak merata sangat berkaitan dengan permasalahan kemasyarakatan, daya dukung serta daya tampung lingkungan/wilayah, juga persoalan penyediaan kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan.

Secara administratif pemerintahan Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Palangka Raya adalah sebesar 97 Jiwa/km<sup>2</sup> yang artinya bahwa ada 97 hingga 98 jiwa yang tinggal dalam 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pahandut merupakan kecamatan yang wilayahnya paling padat yaitu sebesar 810 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan

Rakumpit merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu hanya sebesar 3 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.4 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup>  
Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
	Jiwa	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pahandut	96 723	35,09	810
2. Sabangau	17 922	6,50	28
3. Jekan Raya	143 508	52,09	370
4. Bukit Batu	14 039	5,09	23
5. Rakumpit	3 475	1,26	3
Palangka Raya	275 667	100,00	97

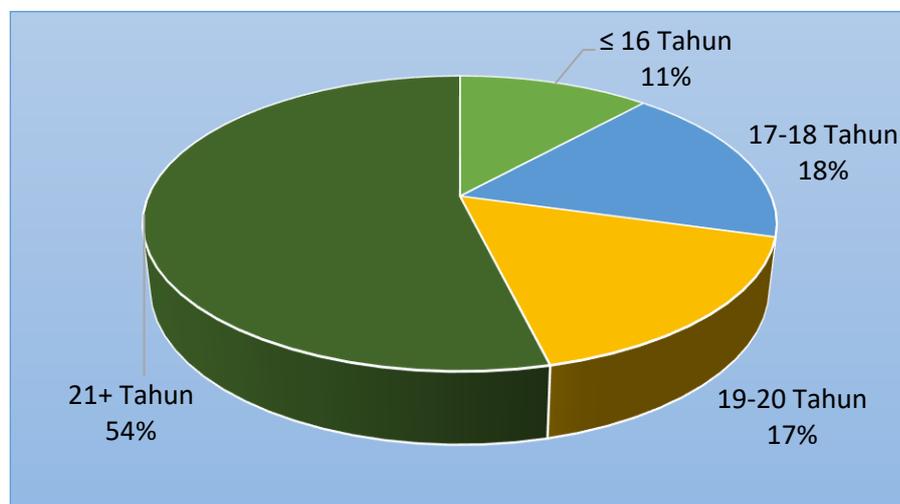
Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2018

Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yaitu di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya memberikan gambaran arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat, karena biasanya daerah yang sudah maju, lebih padat penduduknya. Di samping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai perilaku atau kebiasaan pindah ke daerah lain atau lebih sering disebut merantau seperti untuk alasan mencari nafkah. Pemerataan pembangunan mutlak dilakukan jika ingin mendapatkan persebaran penduduk yang merata. Pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, akses jalan dan lain-lain dapat memberikan daya tarik terhadap suatu daerah. Pemerataan kesempatan kerja juga harus diperhatikan karena salah satu alasan migrasi penduduk ke daerah perkotaan adalah harapan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik dibanding di daerah perdesaan.

## 2.4 Pengendalian Jumlah Penduduk

Keluarga Berencana adalah salah satu usaha mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan dan penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi. Tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.

Usia perkawinan pertama pada penduduk wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Tingkat kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dipengaruhi oleh masa reproduksi. Semakin panjang masa reproduksi, memungkinkan semakin banyak anak yang dilahirkan. Disisi lain, semakin muda usia seorang wanita pada saat perkawinan pertama berpotensi pada semakin panjang masa reproduksi. Sebagai referensi, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan minimal harus sudah berumur 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal untuk menikah 18 tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengisyaratkan usia ideal untuk pernikahan pertama bagi seseorang adalah 21-25 tahun.



**Gambar 2.3 Persentase Wanita Usia 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Palangka Raya, Tahun 2017**

**Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Pendidikan dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2017**

Pendidikan Tertinggi	Status Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah
	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	NA	62,14	21,15	100,00
SD dan sederajat	16,45	48,17	35,37	100,00
SMP dan sederajat	10,38	64,75	24,87	100,00
SMA ke atas	11,16	57,04	31,80	100,00
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>12,49</b>	<b>57,30</b>	<b>30,20</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Lebih dari 50 persen wanita Palangka Raya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih dari 21 tahun, artinya sudah sesuai dengan usia perkawinan ideal menurut BKKBN. Pernikahan pada kelompok umur 10-18 tahun pada tahun 2017 juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 wanita yang menikah pada usia 10 s.d 18 tahun sebesar 29 persen, lebih rendah dari tahun 2016 yang sebesar 31,96 persen. Hal ini mengindikasikan kecenderungan masih terdapat wanita yang menikah di usia yang sangat muda. Umumnya Pasangan Usia Subur (PUS) sudah menyadari perlunya ber-KB dan mereka memahami bahwa dengan dua anak lebih baik, jumlah keluarga yang terencana, dan jarak kelahiran yang tepat sesuai perencanaan. Berdasarkan hasil Susenas 2017, pada tahun 2017 terdapat sekitar 57,30 persen wanita berusia 15-49 tahun yang berstatus menikah yang sedang menggunakan KB. Selain itu, tercatat pula 12,49 persen wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus menikah tidak menggunakan KB lagi dan 30,20 persen wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus menikah yang tidak pernah menggunakan KB.

**Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2017**

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/Tubektomi	1,85	4,33	2,86
MOP/Vasektomi	0,00	0,36	0,25
AKDR/IUD/Spiral	2,56	2,56	1,63
Suntikan	46,60	51,19	56,18
KB/Norplant/Implanon/Alwalit	3,79	5,81	2,80
Pil	42,00	30,56	29,10
Kondom/Karet	2,11	3,21	2,00
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,00	0,00	0,00
Cara tradisional	1,09	1,98	4,14
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Dari sejumlah pemakai alat kontrasepsi, alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah suntik dan pil, dimana terdapat 56,18 persen wanita yang menggunakan suntik dan 29,10 persen menggunakan pil KB, sedangkan sisanya alat kontrasepsi yang lain. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya sasaran dari program itu sendiri, dan juga karena lebih praktis dan kemudahan pelayanan bagi para pengguna. Sebaliknya pengguna alat/cara KB jangka panjang seperti IUD, tubektomi maupun vasektomi masih sangat rendah. Proporsi besarnya pemakaian IUD sebesar 1,63 persen, padahal IUD merupakan salah satu alat KB yang efektif, karena tingkat kelangsungan pemakaian IUD lebih tinggi dibandingkan pil atau kondom. Diharapkan dengan pemakaian IUD akan lebih menjamin keberhasilan program KB.

## **BAB III**

### **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan pendidikan, masyarakat dapat berpikir kreatif dan mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan inovasi baru, penerapan teknologi, dan pola pikir yang berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu berubah untuk mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal. Selain itu, rendahnya pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan.

#### **3.1 Rasio Murid-Guru**

Keberadaan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterapkan tergantung pada ketersediaan fasilitas/sarana pendidikan yang ada baik dari sarana fisik maupun sumber daya manusianya (guru).

Rasio Murid-Guru adalah rasio antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Rasio Murid-Guru dapat memberikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar. Hal ini berarti semakin tinggi Rasio Murid-Guru, maka semakin banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Banyaknya murid yang dididik akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Rasio Murid-Guru selama periode tahun ajaran 2014/2015 sampai 2017/2018 untuk tingkat SD berada di kisaran angka 13, ini berarti rata-rata seorang guru SD mendidik sebanyak 13 sampai 14 anak didik. Rasio murid-guru MI lebih besar dari rasio murid-guru SD, yaitu sebesar 18. Rasio murid-guru di sekolah SMP mengalami perubahan yang cukup drastis, dari 9,98 pada tahun 2016 menjadi 15 pada tahun

2017. Perubahan rasio murid-guru untuk sekolah MTS, SMA, MA, dan SMK tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016

**Tabel 3.1 Perkembangan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2017/2018**

Jenjang Pendidikan	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>SD/MI</b>				
SD	13,40	13,40	13,54	13
MI	18,43	15,07	17,45	18
<b>SMP/MTs</b>				
SMP	9,82	9,95	9,98	15
MTS	13,58	11,41	13,14	13
<b>SMA/MA/SMK</b>				
SMA	14,27	14,27	10,81	10
MA	9,98	8,95	11,17	10
SMK	3,71	4,20	8,79	9

Sumber : Palangka Raya Dalam Angka 2018

Secara umum rasio murid guru di Kota Palangka Raya masih ideal. Sebagai contoh, rasio murid-guru di SD sebesar 13, jumlah ini masih sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

### 3.2 Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa

dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

### 3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Pendidikan Non Formal yang turut diperhitungkan adalah Paket A, Paket B dan Paket C. APS bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 5 -18 Tahun menurut Golongan Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017**

Kuintil Pengeluaran	5-6	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kuintil 1</b>	44,86	100,00	85,11	47,10
<b>Kuintil 2</b>	34,84	100,00	97,84	68,09
<b>Kuintil 3</b>	31,16	98,62	100,00	82,81
<b>Kuintil 4</b>	NA	100,00	100,00	83,71
<b>Kuintil 5</b>	NA	100,00	94,45	100,00
Kota Palangka Raya	<b>30,64</b>	<b>99,72</b>	<b>95,02</b>	<b>74,76</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Pada umur 5-6 tahun, APS masih kecil (hanya 30,64 persen) karena sebagian anak-anak masih sekolah TK dan tidak termasuk mengikuti Pendidikan formal ataupun nonformal. Pada kelompok umur 7-12 tahun APS menunjukkan angka yang paling tinggi (99,72 persen) dibandingkan kelompok umur lain. Hal ini dikarenakan adanya program wajib belajar 9 tahun. Masih adanya anak yang tidak sekolah pada umur tersebut dapat terjadi karena faktor cacat ataupun faktor yang lain. Pada kelompok

umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun, APS mulai berkurang mengindikasikan ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya.

### 3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pada jenjang sekolah SD, nilai APK mencapai 115 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD terdapat murid yang berumur kurang dari 7 tahun ataupun melebihi 12 tahun. Demikian juga yang terjadi pada APK untuk jenjang SMA. Nilai APK pada jenjang SMP justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada jenjang sekolah ini, APK hanya 78,02 persen. Hal ini mengindikasikan pada kelompok umur 13-15 tahun, terdapat anak-anak yang justru masih sekolah SD ataupun justru sudah SMA. Hal ini terjadi karena baru beberapa tahun terakhir peraturan mengenai batasan umur anak masuk sekolah diterapkan.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017**

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	111,32	83,43	89,27	39,70
Perempuan	119,08	72,93	116,88	38,38
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>115,12</b>	<b>78,02</b>	<b>102,37</b>	<b>39,03</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

### 3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai persentase anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2017**

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	100,00	75,99	51,43	27,78
Perempuan	100,00	70,39	67,69	26,70
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>100,00</b>	<b>73,11</b>	<b>59,15</b>	<b>27,23</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

APM SD sebesar 100,00 berarti bila terdapat 100 anak usia SD (7-12 tahun), maka 100 anak tersebut sedang bersekolah SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan, menunjukkan nilai APM semakin kecil. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu terdapat anak yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan terdapat anak yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang sesuai.

### 3.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas SDM. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai mencerminkan taraf intelektualitas masyarakat. Pendidikan merupakan investasi SDM

yang diperlukan sebagai salah satu pendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Kualitas SDM yang makin tinggi diharapkan dapat menjadikan daya saing semakin tinggi di tengah era persaingan global.

Penduduk yang tidak mempunyai ijazah dan memiliki ijazah SD hanya 27,41 persen, hal ini menunjukkan cukup berhasilnya program wajib belajar 9 tahun. Hingga tahun 2017, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Palangka Raya memiliki ijazah SMA/MA yaitu sebesar 29,15 persen. Jenjang pendidikan yang paling sedikit dipilih oleh penduduk adalah DI/DII dengan hanya 1,31 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah di jenjang Pendidikan tersebut.

Bila dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya untuk jenjang Pendidikan SMA/MA dan perguruan tinggi, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah di jenjang pendidikan tersebut lebih tinggi dibandingkan perempuan.

**Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, Tahun 2017**

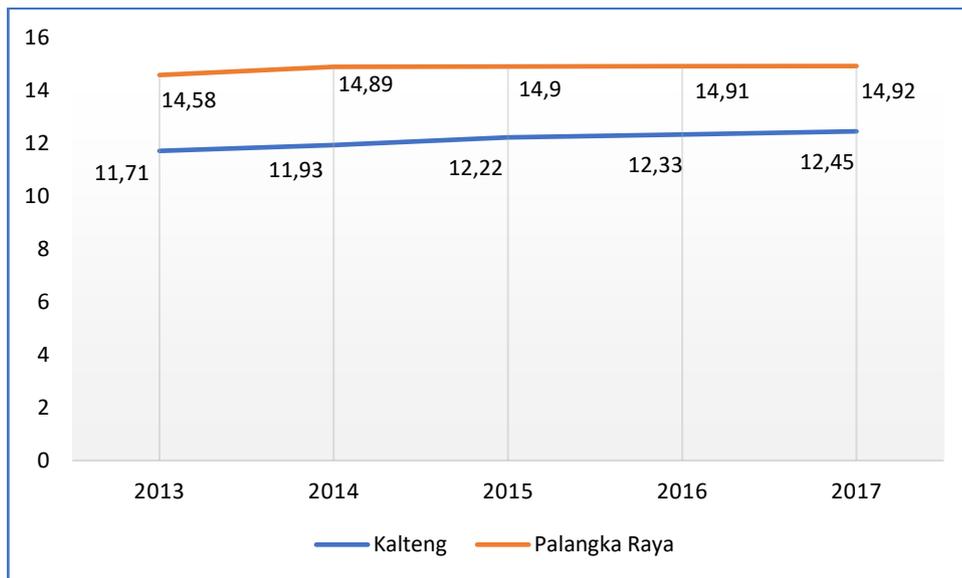
Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	5,42	9,27	7,29
SD/MI	19,72	20,55	20,12
SMP/MTs	21,19	22,70	21,93
SMA/MA	31,34	26,83	29,15
SMK/MAK	3,94	4,86	4,39
DI/DII	0,89	1,75	1,31
Akademi/DIII	2,20	3,43	2,80
DIV/S1/S2/S3	15,30	10,61	13,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Suplemen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2017

### 3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun keatas sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas yang ingin menempuh pendidikan formal. Pada tahun 2013 di Kota Palangka Raya angka harapan lama sekolah sebesar 14,58 tahun. Tahun 2017 angka harapan lama sekolah sebesar 14,92 tahun yang artinya penduduk di Kota Palangka Raya berharap supaya dapat menempuh pendidikan formal setidaknya selama 14,92 tahun.



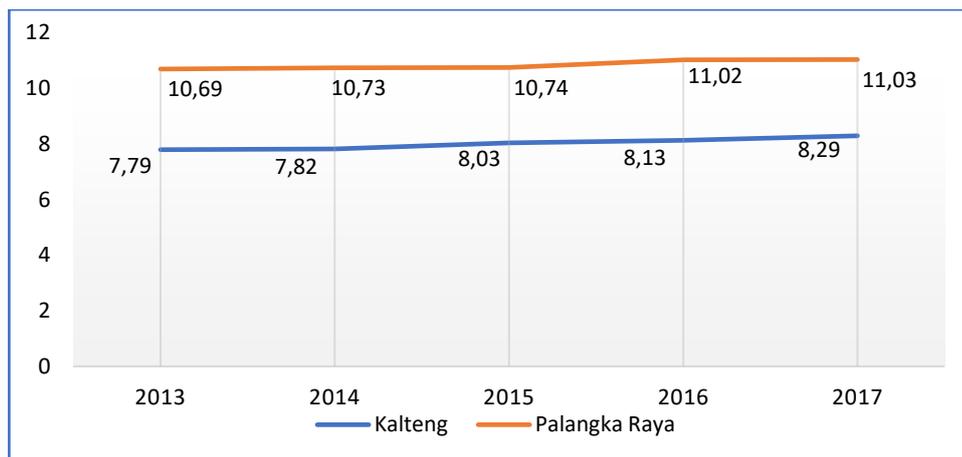
**Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017**

Hal ini berarti rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas ingin agar dapat menempuh pendidikan setidaknya sampai jenjang universitas atau setidaknya program Diploma 3. Perkembangan angka harapan lama sekolah lebih lambat dari pada

perkembangan angka rata-rata lama sekolah. Adapun salah satu faktor yang diduga paling berpengaruh terhadap perkembangan angka ini adalah faktor biaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula biaya yang diperlukan, hal ini yang menyebabkan mengapa angka harapan lama sekolah perkembangannya tidak seoptimis angka rata-rata lama sekolah.

### 3.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



**Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017**

Pada Gambar 3.2, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun keatas adalah

sebesar 11,03 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk adalah sampai jenjang pendidikan kelas 2 SMA. Pergerakan angka rata-rata lama sekolah akan dibatasi faktor penduduk yang tidak bersekolah lagi. Perbaikan angka rata-rata lama sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh generasi baru yang menuntut ilmu di sekolah. Gambar menunjukkan bahwa derajat pendidikan Palangka Raya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jika rata-rata pendidikan penduduk Palangka Raya adalah kelas 2 SMA, maka rata-rata pendidikan penduduk di wilayah lain di Kalimantan Tengah adalah kelas 2 SMP.

### 3.6 Kemampuan Membaca dan Menulis

Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan. Melalui kegiatan membaca, setiap orang dapat mengikuti perkembangan baru yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan membaca dan menulis adalah Angka melek huruf (AMH). Bahkan, indikator ini digunakan dalam penghitungan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) metode yang lama. Akan tetapi, pada IPM metode baru tidak digunakan lagi karena AMH di sebagian besar wilayah telah cukup tinggi dan pergerakannya sudah tidak sensitif lagi. Sebagai ganti indikator ini, digunakan HLS dan RLS.

**Tabel 3.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Tahun 2017**

Kuintil Pengeluaran	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kuintil 1</b>	98,51	19,19	NA	0,22
<b>Kuintil 2</b>	99,70	43,05	NA	0,30
<b>Kuintil 3</b>	99,81	29,99	NA	0,19
<b>Kuintil 4</b>	99,82	37,57	5,23	-
<b>Kuintil 5</b>	100,00	29,24	7,73	-
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>99,60</b>	<b>32,10</b>	<b>4,59</b>	<b>0,14</b>

Pada tahun 2017, penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Palangka Raya yang buta huruf hanya sebesar 0,14 persen. Dengan demikian sebesar 99,86 persen penduduk usia 15 tahun ke atas telah melek huruf. Sebagian besar penduduk mampu membaca dan menulis huruf latin, bahkan mencapai 99,6 persen. Penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf arab sebesar 32,10 persen dan yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya hanya 4,59 persen. Bila dilihat golongan pengeluarannya, penduduk yang masih buta huruf berada pada golongan kuintil 1 sampai dengan 3.

## **BAB IV KESEHATAN**

Faktor kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan, karena dengan kondisi fisik yang sehat memungkinkan seseorang menjadi produktif. Penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik, merupakan esensi yang berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi keluarga. Hal ini selaras dengan komitmen global melalui program Millenium Development Goals (MDGs) dalam upaya meningkatkan status kesehatan, yakni (a). menurunkan angka kematian anak sebesar dua per tiganya pada tahun 2016 dari keadaan tahun 1990; (b). menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar dua per tiganya pada tahun 2016 dari keadaan tahun 1990; dan (c). menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya pada tahun 2016.

### **4.1 Angka Kesakitan (*Morbiditas*)**

Selama empat tahun terakhir, persentase angka kesakitan (*morbiditas*) penduduk Kota Palangka Raya cenderung menurun. Angka kesakitan pada tahun 2014 sebesar 17,77 persen mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 15,79 persen, menjadi 13,08 persen pada tahun 2016, dan turun kembali menjadi 12,30 persen pada tahun 2017. Sementara itu, rata-rata lama gangguan kesehatan berkisar pada 3 hingga 6 hari. Pada tahun 2017 rata-rata lama terganggu kesehatan berkurang dari 5 s.d 6 hari menjadi 4 s.d 5 hari.

### **4.2 Penduduk Berobat**

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2017) menunjukkan bahwa dari penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, sekitar 28,33 persen berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Sebesar 71,67 persen tidak berobat jalan mengaku mengobati sendiri (83,13 persen), merasa tidak perlu (14,36 persen), tidak punya biaya berobat (1,64 persen), tidak ada biaya transport (0,38 persen), waktu tunggu pelayanan lama (0,24 persen), dan lainnya (0,25 persen). Sebagian besar masyarakat Kota Palangka Raya melakukan rawat jalan di Praktek Dokter/Bidan, yakni sebesar 30,52 persen.

Masyarakat yang berobat jalan ke layanan puskesmas sebesar 24,78 persen, ke rumah sakit pemerintah sebesar 19,82 persen, ke klinik/praktek dokter Bersama sebesar 11,00 persen, ke rumah sakit swasta sebesar 5,41 persen, ke praktek pengobatan tradisional sebesar 1,66 persen, dan ke UKBM sebesar 1 persen.

**Tabel 4.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Palangka Raya, Tahun 2014-2017**

Tahun	Angka Kesakitan(%)	Lama Terganggu Kesehatan (hari)
(1)	(2)	(3)
2014	17,77	3,74
2015	15,79	4,82
2016	13,08	5,89
2017	12,30	4,88

Sumber : Susenas 2014-2017

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Palangka Raya Tahun 2014-2016 (Persen)**

Tempat Berobat	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	15,14	23,5	24,68	23,23
Praktek Dokter/Klinik/Nakes/UKBM	35,53	25,22	46,83	51,49
Puskesmas	54,03	43,19	31,11	24,78
Pengobatan Tradisional	1,11	1,65	4,69	1,66
Dukun Bersalin dan Lainnya	5,93	5,91	0,71	0,00

Sumber : Susenas 2014-2017

Masyarakat Palangka Raya yang berobat jalan hampir separuhnya menggunakan jaminan kesehatan. Bahkan, untuk penduduk perempuan yang berobat jalan 50,4 persennya menggunakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini terdiri dari BPJS PBI dan Non PBI, Jamkesda, asuransi swasta, dan jaminan dari perusahaan/kantor.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Palangka Raya, Tahun 2017**

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
(1)	(2)
Laki-laki	46,88
Perempuan	50,40
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>48,84</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun menurut Kuintil Pengeluaran dan Rata-rata Lama Rawat Inap, 2017**

Kuintil Pengeluaran	Pernah dirawat Inap Selama Setahun Terakhir	Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)
(1)	(2)	(3)
Kuintil 1	1,90	2,63
Kuintil 2	3,92	5,04
Kuintil 3	2,35	3,62
Kuintil 4	6,88	5,36
Kuintil 5	7,39	4,39
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>4,49</b>	<b>4,57</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Untuk penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, yang pernah rawat inap hanya 4,49 persen. Bila dilihat per golongan pengeluarannya, semakin tinggi golongan pengeluaran semakin tinggi persentase pernah rawat inap. Adapun lamanya rawat inap berkisar 2 s.d 6 hari. Untuk golongan kuintil 1, persentase yang rawat inap sangat kecil dan rata-rata lama rawat inap juga sebentar. Hal ini kemungkinan diakibatkan mereka kurang mampu untuk menanggung biaya rawat inap, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

### 4.3 ASI dan Imunisasi

Manusia yang berkualitas dilahirkan dan dibesarkan dengan cara terbaik, mulai dari asupan gizi sejak dalam kandungan, imunisasi, dan pemenuhan hak anak terhadap air susu ibu (ASI). Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan pertama, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan minuman lain. Selanjutnya, bersama dengan makanan tambahan, ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

**Tabel 4.5 Persentase Anak Usia kurang dari 2 tahun yang Pernah Disusui, dan Lamanya Disusui, Palangka Raya 2014-2017**

Tahun	Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Pernah Disusui (%)	Rata-rata Lama Disusui (bulan)
(1)	(2)	(3)
2014	97,14	9,35
2015	97,05	8,46
2016	88,73	10,52
2017	91,79	9,96

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Selama tahun 2016 hampir seluruh anak usia kurang dari 2 tahun di Kota Palangka Raya mendapatkan hak ASI, yakni lebih dari 88,73 persen. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 91,79 persen. Namun, rata-rata lama pemberian ASI juga mengalami penurunan dari 10 hingga 11 bulan pada tahun 2016 menjadi 9 hingga 10 bulan pada tahun 2017.

Pemberian imunisasi pada balita sangat penting sebagai salah satu upaya mencegah penyakit. Imunisasi dapat mencegah wabah penyakit seperti difteri, campak, hepatitis B, dll. Dengan pemberian imunisasi, diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Bayi. Banyak sekali kematian akibat penyakit dapat dicegah dengan menggunakan imunisasi ini, akan tetapi banyak orang masih meragukan keamanannya. Imunisasi di Indonesia dikenal oleh masyarakat sejak tahun 1970. Pemberian imunisasi pada bayi bertujuan agar tidak rentan terkena penyakit sejak dini hingga ketika tumbuh dewasa.

Selama tiga tahun terakhir, persentase pemberian imunisasi BCG pada usia balita sebesar 99,49 persen di tahun 2015, pada tahun 2016 menurun menjadi 92,24 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 92,25 persen. Kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Hepatitis B cukup besar hal ini nampak pada persentase pemberian imunisasi untuk keempat jenis imunisasi tersebut yang selalu di atas 90 persen. Adapun persentase layanan pemberian imunisasi jenis campak/morbili hanya 76,29 persen.

**Tabel 4.6 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi di Palangka Raya Tahun 2015-2017**

Jenis Imunisasi	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	99,49	92,24	92,25
DPT	93,26	91,78	91,19
Poio	96,20	96,99	93,75
Campak/Morbili	92,08	69,38	76,29
Hepatitis B	91,61	89,06	90,92

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

#### 4.4 Kebiasaan Merokok

Salah satu kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi kesehatan adalah kebiasaan merokok. Rokok merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan merupakan satu-satunya produk legal yang membunuh seperti hingga setengah penggunaannya. Survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2007 menyebutkan setiap jam sekitar 46 orang meninggal dunia karena penyakit yang berhubungan dengan merokok di Indonesia. Dari Susenas yang telah dilaksanakan BPS Kota Palangka Raya tahun 2017 diketahui bahwa 18,95 persen penduduk di atas 5 tahun merokok. Rata-rata batang rokok yang dihisap adalah sebanyak 96 s.d 97 batang per minggu. Bila dilihat menurut golongan pengeluarannya, penduduk di kuintil 1 lebih

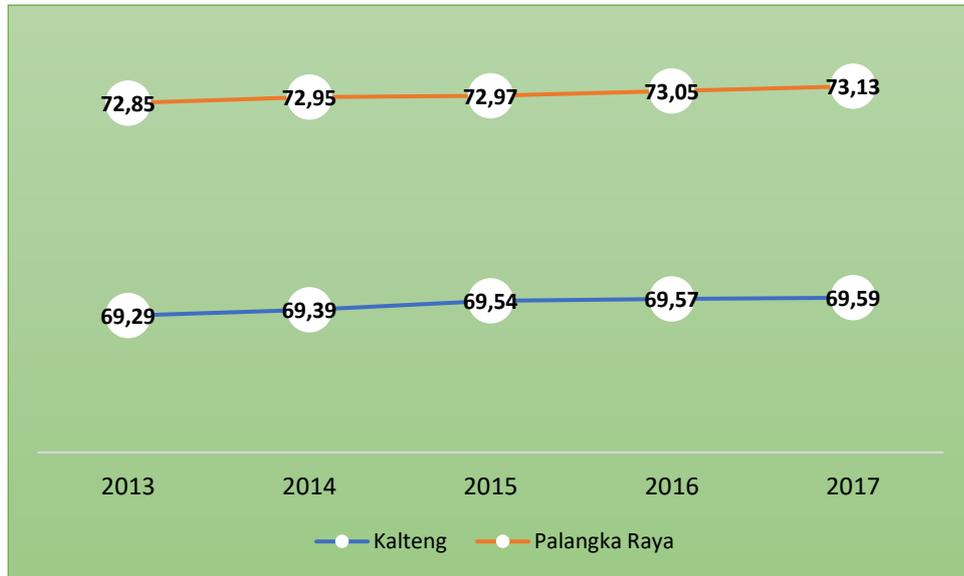
banyak yang merokok, tetapi jumlah rata-rata batang yang dihisap selama seminggu lebih tinggi pada golongan kuintil 4.

**Tabel 4.7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Golongan Pengeluaran, 2017**

Kuintil Pengeluaran	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok	Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu
(1)	(2)	(3)
<b>Kuintil 1</b>	22,98	80,43
<b>Kuintil 2</b>	19,56	88,75
<b>Kuintil 3</b>	19,99	108,73
<b>Kuintil 4</b>	16,48	106,57
<b>Kuintil 5</b>	16,56	102,34
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>18,95</b>	<b>96,98</b>

#### 4.5 Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.



**Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2013 s.d 2017**

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palangka Raya relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan, mulai tahun 2016 mencapai AHH Kota Palangka Raya 73 tahun lebih, sedangkan AHH Kalimantan Tengah secara keseluruhan masih di bawah 70 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di Kota Palangka Raya menikmati masa hidup yang lebih Panjang dan lebih sehat jika dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah.

## **BAB V**

### **KETENAGAKERJAAN**

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun, tidak semua penduduk mampu melakukannya, karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang umumnya menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional, yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang menganggur. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

**Tabel 5.1 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2015 dan 2017**

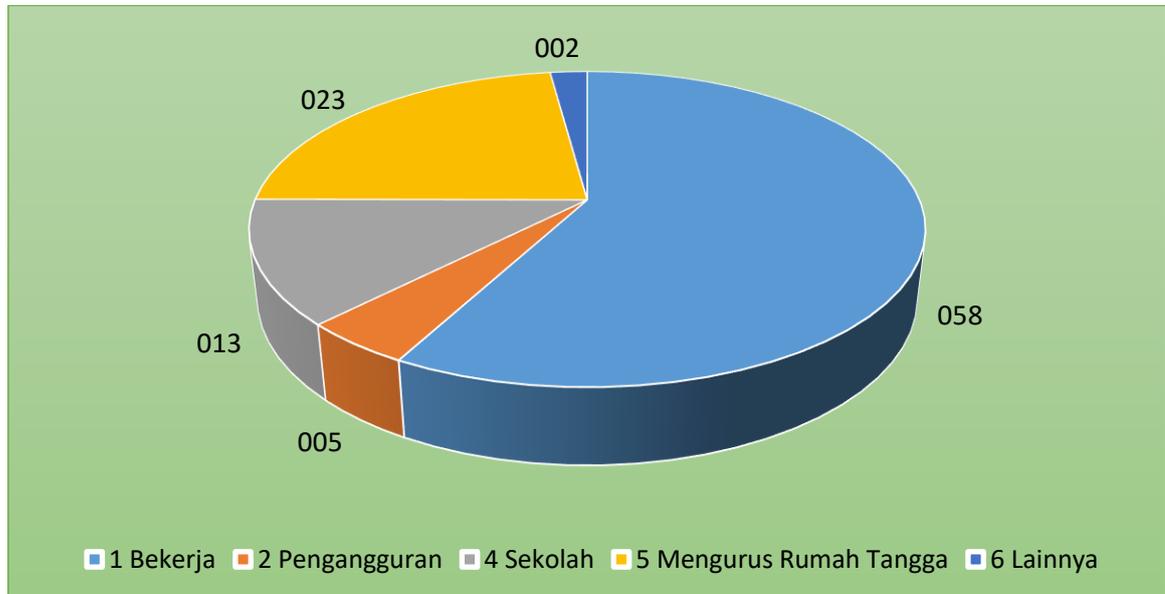
<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Angkatan Kerja	127.632	129.473
Bukan Angkatan Kerja	66.580	78.020
Jumlah	194.212	207.493

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 dan 2017

#### **5.1 Penduduk Usia Kerja**

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Seiring dengan penambahan penduduk dari tahun ke tahun, maka terjadi pula peningkatan jumlah angkatan kerja di Kota Palangka Raya. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebesar 127.632 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi 129.473 jiwa. Demikian pula dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja, pada

tahun 2015 jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah sebesar 66.580 jiwa dan pada tahun 2017 sebesar 78.020 jiwa.



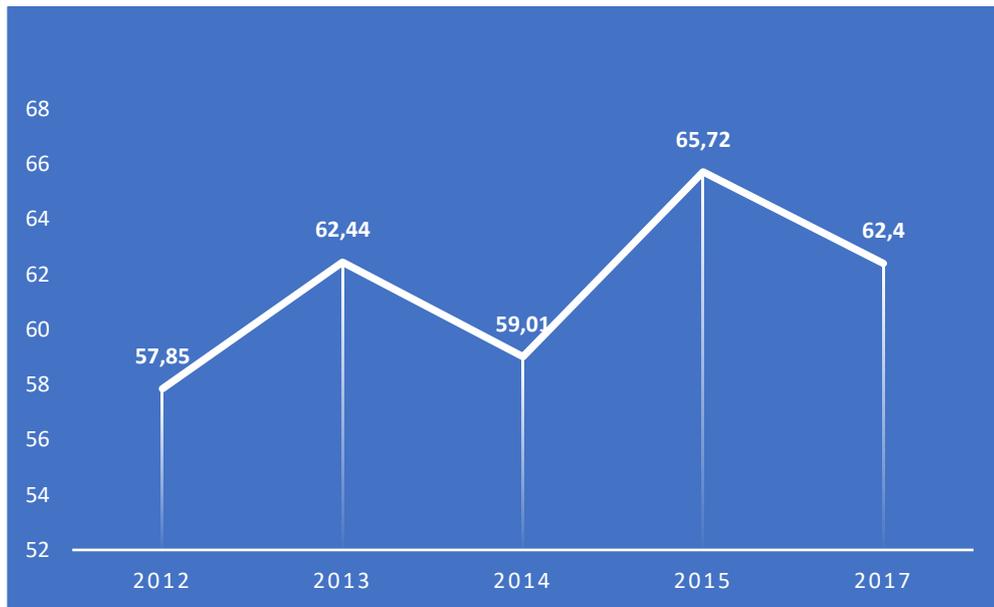
**Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Berdasarkan jenis kegiatan seminggu yang lalu, persentase penduduk usia kerja yang bekerja seminggu yang lalu adalah sebesar 57,87 persen. Kegiatan penduduk usia kerja yang terbesar setelah bekerja adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 22,82 persen. Penduduk usia kerja yang sedang sekolah sebesar 12,67 persen. Adapun penduduk usia kerja yang menganggur selama seminggu lalu sebesar 4,53 persen.

## 5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain. Ketenagakerjaan secara sepintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi sering dinamakan sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Dari gambar 5.1 dapat dihitung TPAK dengan

menjumlahkan persentase penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja, yaitu menjadi sebesar 62,40 persen.



**Gambar 5.2 Perkembangan TPAK Kota Palangka Raya Tahun 2012 s.d 2017**

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat dilihat perkembangan TPAK Kota Palangka Raya dari tahun 2012 sampai 2017. TPAK tertinggi ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 65,72 persen dan terendah adalah di tahun 2012 yaitu sebesar 57,85 persen. Pada tahun 2017, TPAK sebesar 62,40 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 62 hingga 63 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis. Peningkatan nilai TPAK dibandingkan tahun sebelumnya ini dapat mendorong perekonomian jika tersedia lapangan usaha yang cukup. Akan tetapi, bila lapangan usaha tidak cukup, maka akan menimbulkan beban pada perekonomian dalam bentuk pengangguran.

### **5.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2017 tingkat

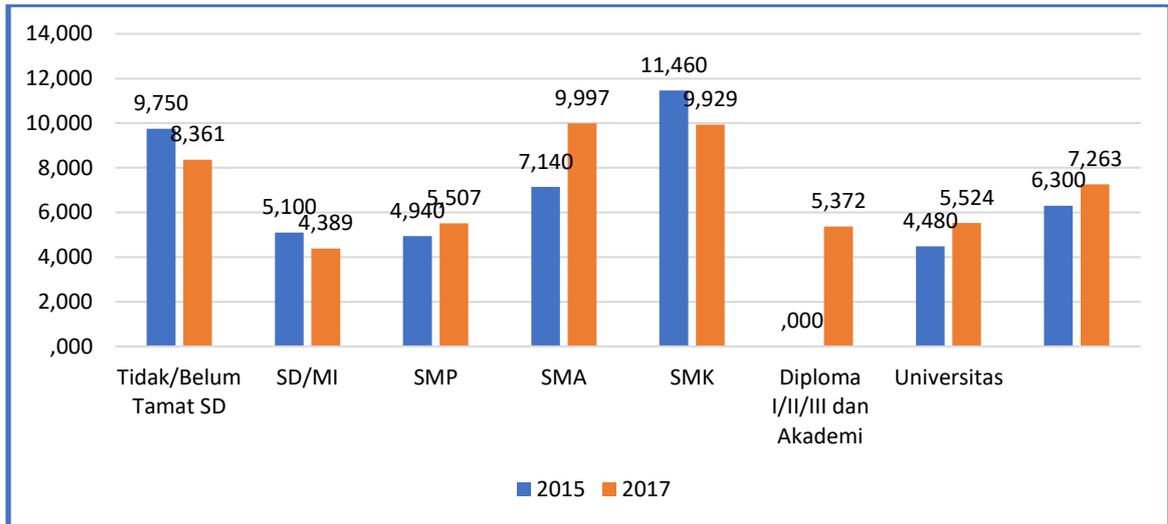
kesempatan kerja di Kota Palangka Raya adalah sebesar 92,74 persen. Ini berarti sekitar 92 hingga 93 orang dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja.

**Tabel 5.2 Persentase TKK dan TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2017**

Uraian	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Tingkat Kesempatan Kerja		
- Laki-Laki	93,01	94,47
- Perempuan	94,79	89,77
- Laki-laki + Perempuan	93,70	92,74
Tingkat Pengangguran Terbuka		
- Laki-Laki	6,99	5,53
- Perempuan	5,21	10,23
- Laki-laki + Perempuan	6,30	7,26

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 dan 2017 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka. Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang belum mulai bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2017, dari 100 angkatan kerja laki-laki 5 s.d 6 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan 10 s.d 11 orang diantaranya menganggur. Pada Agustus 2017, angka pengangguran terbuka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Agustus 2015, dari 6,3 persen naik menjadi 7,26 persen. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja di Palangka Raya.



**Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Palangka Raya Tahun 2015 dan 2017**

Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2017 TPT paling besar pada kelompok angkatan kerja berpendidikan SMA/ sederajat (sebesar 10 persen), angkatan kerja berpendidikan SMK (9,93 persen), dan yang tidak/belum tamat SD (sebesar 8,36 persen). Gambar 5.3 menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlalu jauh berbeda kondisinya dengan tahun 2015. Hal ini memberikan peringatan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada penduduk kelompok Pendidikan tersebut, misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka dapat bekerja.

#### 5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Di samping itu, indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

**Tabel 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan &amp; Perikanan</b>	6,80	1,62	4,95
<b>2 Pertambangan dan Penggalian</b>	3,54	0,99	2,63
<b>3 Industri</b>	5,18	2,71	4,30
<b>4 Listrik, Gas dan Air Minum</b>	1,43	1,41	1,43
<b>5 Konstruksi</b>	13,69	1,00	9,16
<b>6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi</b>	32,05	44,56	36,51
<b>7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi</b>	3,73	1,27	2,85
<b>8 Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan &amp; Js Perusahaan</b>	5,19	1,92	4,02
<b>9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan</b>	28,40	44,52	34,15
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah, 2017

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi adalah sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kota Palangka Raya. Dari jumlah 120.070 penduduk Palangka Raya yang bekerja, penduduk yang bekerja di sektor tersebut berkisar 43.839 orang atau sekitar 36,51 persen. Setelah sektor perdagangan, sektor yang cukup banyak menyerap lapangan usaha adalah sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Sektor ini mampu menyerap sekitar 41.000 orang, atau sekitar 34,15 persen dari penduduk yang bekerja. Adapun sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja di Kota Palangka Raya adalah sektor Listrik, Gas, dan Air dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.711 orang atau sekitar 1,43 persen.

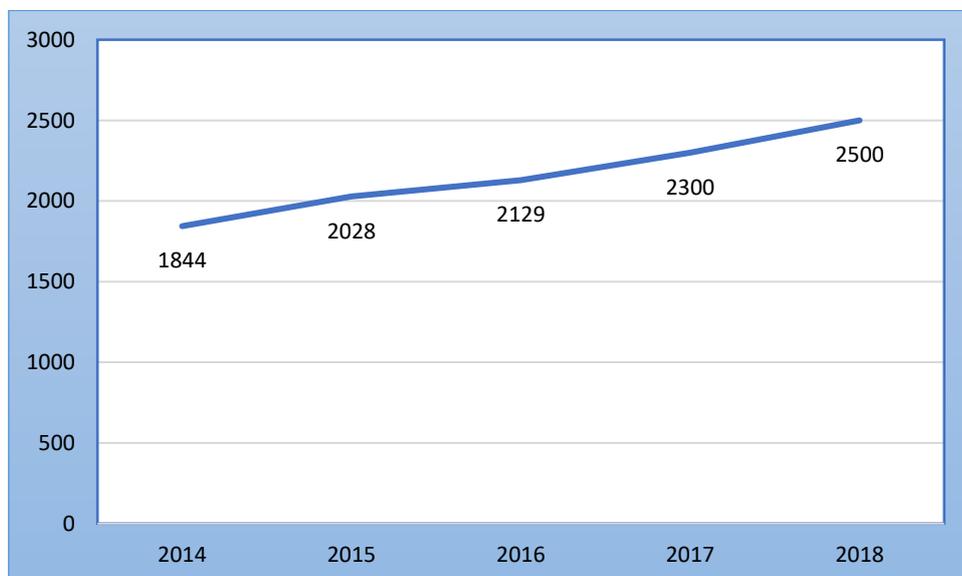
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki paling banyak bekerja pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 32,05

persen. Demikian juga penduduk perempuan paling banyak bekerja pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 44,56 persen.

### 5.5 Upah Minimum Kota (UMK)

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Akan tetapi, istilah ini diganti menjadi Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

UMK Kota Palangka Raya berdasarkan gambar 5.4 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2018, UMK Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp. 2.500.930 per bulan. Terjadi peningkatan sebesar 8,70 persen jika dibandingkan dengan UMK Tahun 2017 dimana pada tahun tersebut UMK sebesar Rp. 2.300.552 per bulan. Peningkatan UMK ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya.



**Gambar 5.4 Perkembangan UMK Kota Palangka Raya, Tahun 2014 s.d 2018**

**Tabel 5.4 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (Rupiah) Penduduk Palangka Raya Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Tahun 2015 dan 2017**

Lapangan Usaha	2015	2017
(1)	(2)	(3)
<b>1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan &amp; Perikanan</b>	1 208 269	2.164.861
<b>2 Pertambangan dan Penggalian</b>	3 751 567	1.386.764
<b>3 Industri</b>	1 629 394	1.898.692
<b>4 Listrik, Gas dan Air Minum</b>	5 315 378	3.057.019
<b>5 Konstruksi</b>	2 379 752	2.692.730
<b>6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi</b>	1 159 486	1.604.430
<b>7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi</b>	2 518 960	3.168.215
<b>8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan &amp; Jasa Perusahaan</b>	3 976 909	3.661.464
<b>9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan</b>	2 854 794	2.929.652
<b>Rata-Rata</b>	2 158 565	2.339.403

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 dan 2017 (diolah)

UMK Palangka Raya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.300.552. Hal ini tidak berbeda jauh dengan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja Palangka Raya. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata upah yang diterima pekerja di Palangka Raya adalah sebesar Rp 2.339.403. Rata-rata upah tertinggi diterima oleh pekerja di sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan yaitu sebesar Rp 3.661.464, sedangkan rata-rata upah terendah diterima oleh pekerja di sektor Pertambangan dan Penggalian.

## **BAB VI**

### **PERUMAHAN**

Pembangunan perumahan dan permukiman menempati posisi yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga menjadi bagian awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga.

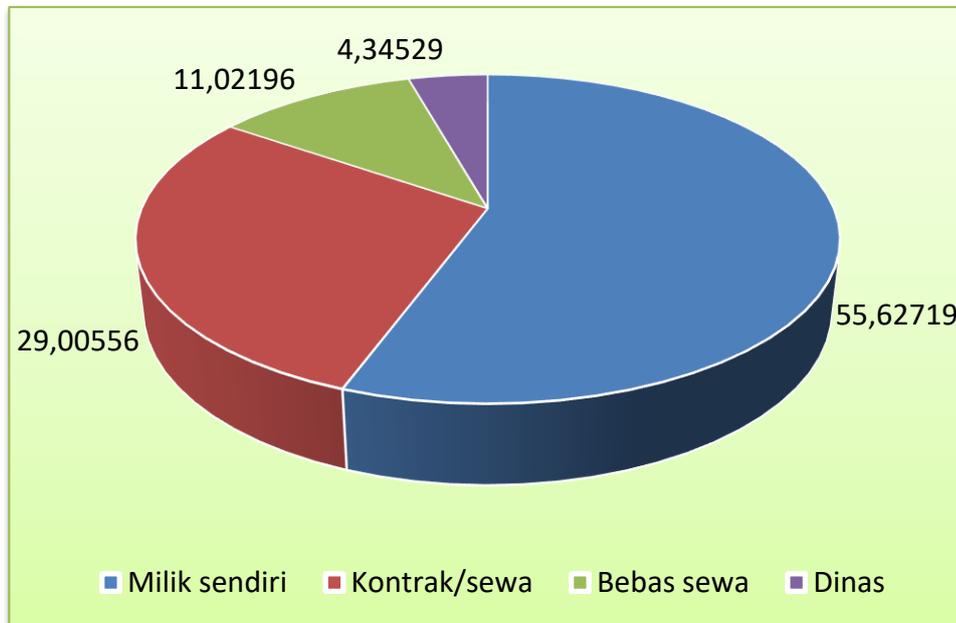
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Perumahan juga mempunyai peranan strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi peningkatan kehidupan masyarakat.

#### **6.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal**

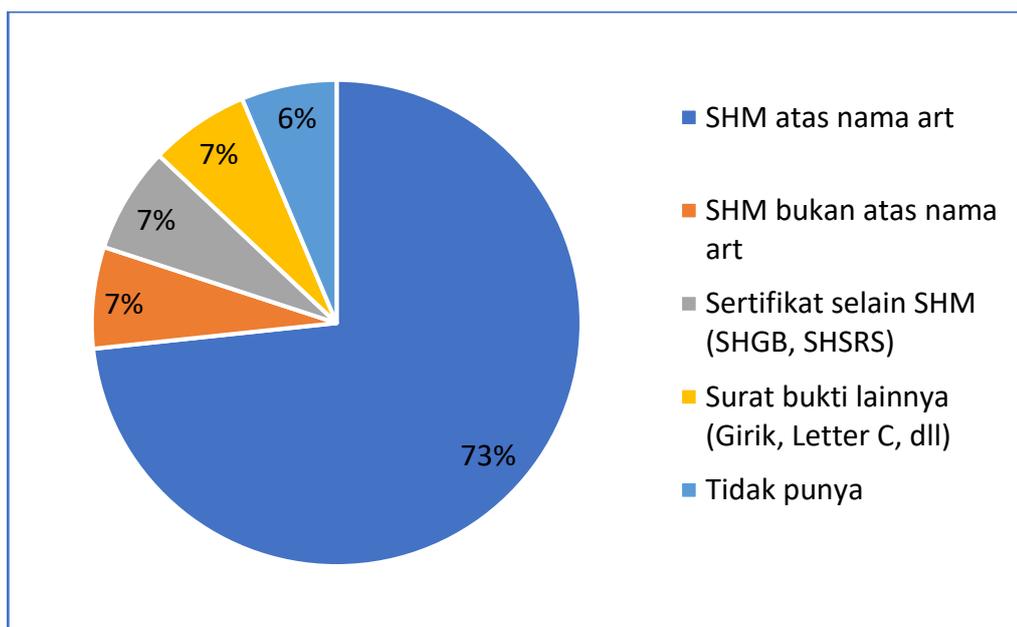
Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan perumahan dan pemukiman, selain itu juga untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Menurut hasil Susenas 2017, secara umum rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 55,63 persen, rumah tangga yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 29,01 persen, rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa sebesar 11,02 persen, dan rumah tangga yang menempati rumah dinas sebesar 4,35 persen.

Dari bangunan tempat tinggal yang merupakan milik sendiri, sebanyak 73,31 persen rumah tangga memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART; 6,75 persen SHM bukan atas nama ART; 7,03 persen sertifikat

selain SHM; 6,60 persen surat bukti lain, dan hanya 6,31 persen yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.



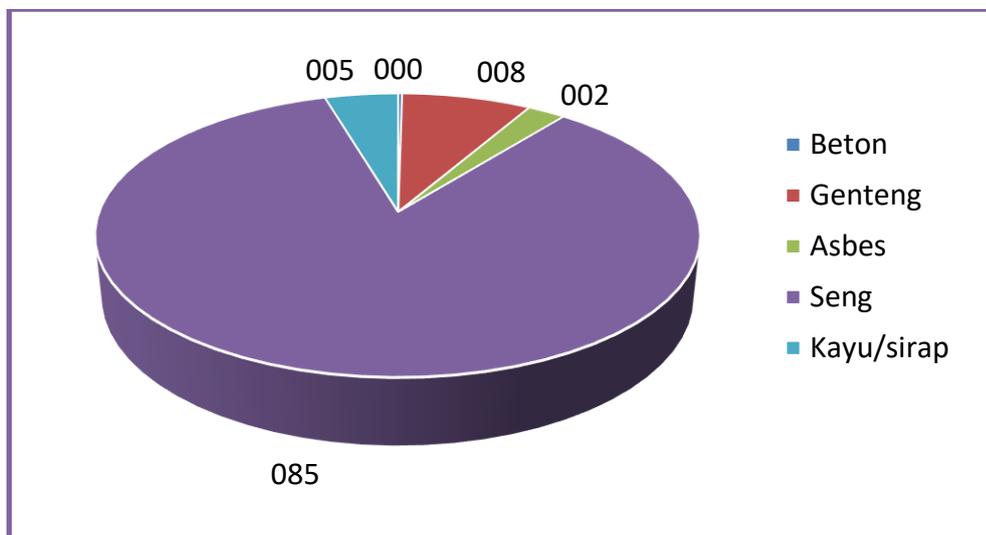
**Gambar 6.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal, di Kota Palangka Raya Tahun 2017**



**Gambar 6.2 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

## 6.2 Komponen Perumahan

Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga diantaranya dapat dilihat dari kualitas material, yang mencakup antara lain jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah, luas lantai dapat merupakan sebagai salah satu faktor penentu, mengingat rumah tangga dengan luas lantai yang cukup memadai dapat memberikan kenyamanan serta udara segar bagi pemiliknya. Fasilitas-fasilitas lain yang juga tidak kurang pentingnya untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi perumahan adalah jenis bahan bangunan yang dipergunakan bagi perumahan itu, bahan bakar yang digunakan untuk memasak, fasilitas penerangan dan lain sebagainya. Disamping itu, harus dilihat pula fasilitas-fasilitas lain yang sangat erat kaitannya dengan sarana-sarana kesehatan, seperti sumber air minum, sumber air untuk mandi dan mencuci pakaian, jamban serta kakus, yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga. Berdasarkan Gambar 6.3, dapat dilihat bahwa untuk atap, di Kota Palangka Raya masih dominan menggunakan seng. Persentase yang menggunakan seng sebagai atap adalah sebesar 84,66 persen. Persentase yang menggunakan atap dari genteng sebesar 8,13 persen, atap kayu/sirap sebesar 4,58 persen, atap dari asbes sebesar 2,39 persen, dan atap dari beton sebesar 0,25 persen.



**Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Selain penggunaan jenis atap, kualitas rumah juga dipengaruhi oleh jenis dinding yang digunakan. Penggunaan dinding dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin. Jenis dinding yang memenuhi syarat rumah layak huni adalah dinding permanen yaitu dinding yang terbuat dari tembok.

Berdasarkan jenis dinding dapat dilihat bahwa penduduk Kota Palangka Raya telah dominan menggunakan tembok sebagai dinding rumah. Persentase penggunaan tembok sebagai dinding rumah adalah sebesar 73,80 persen. Sementara itu untuk dinding yang terbuat dari kayu masih banyak yang menggunakannya di Kota Palangka Raya. Persentase dinding yang terbuat dari kayu adalah sebesar 26,20 persen.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas Tahun 2017**

Karakteristik	Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas			Jumlah
	Tembok	Kayu/Batang kayu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kuintil Pengeluaran</b>				
<b>Kuintil 1</b>	49,01	50,99	-	100
<b>Kuintil 2</b>	52,96	47,04	-	100
<b>Kuintil 3</b>	82,02	17,98	-	100
<b>Kuintil 4</b>	79,90	20,10	-	100
<b>Kuintil 5</b>	90,97	9,03	-	100
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>73,80</b>	<b>26,20</b>	-	<b>100</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah sehingga rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dianggap menempati rumah tidak layak huni. Untuk jenis lantai rumah, sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya telah menggunakan keramik sebagai lantai rumah. Persentase rumah dengan lantai terluas berupa keramik adalah sebesar 57,26 persen. Jenis lantai terbanyak kedua adalah lantai kayu/papan yaitu sebesar 19,99 persen. Adapun untuk lantai semen adalah sebesar 21,02 persen.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Karakteristik	Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas			Jumlah
	Marmmer/granit/Keramik	Kayu/papan	Semen/Bata merah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kuintil Pengeluaran</b>				
<b>Kuintil 1</b>	16,95	35,69	47,37	100
<b>Kuintil 2</b>	32,48	39,3	25,33	100
<b>Kuintil 3</b>	66,32	15,89	15,91	100
<b>Kuintil 4</b>	69,08	15,63	12,2	100
<b>Kuintil 5</b>	80,89	5,02	13,23	100
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>57,26</b>	<b>19,99</b>	<b>21,02</b>	<b>100</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Luas lantai rumah menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit.

**Tabel 6.3 Persentase Perumahan Berdasarkan Luas Lantai di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

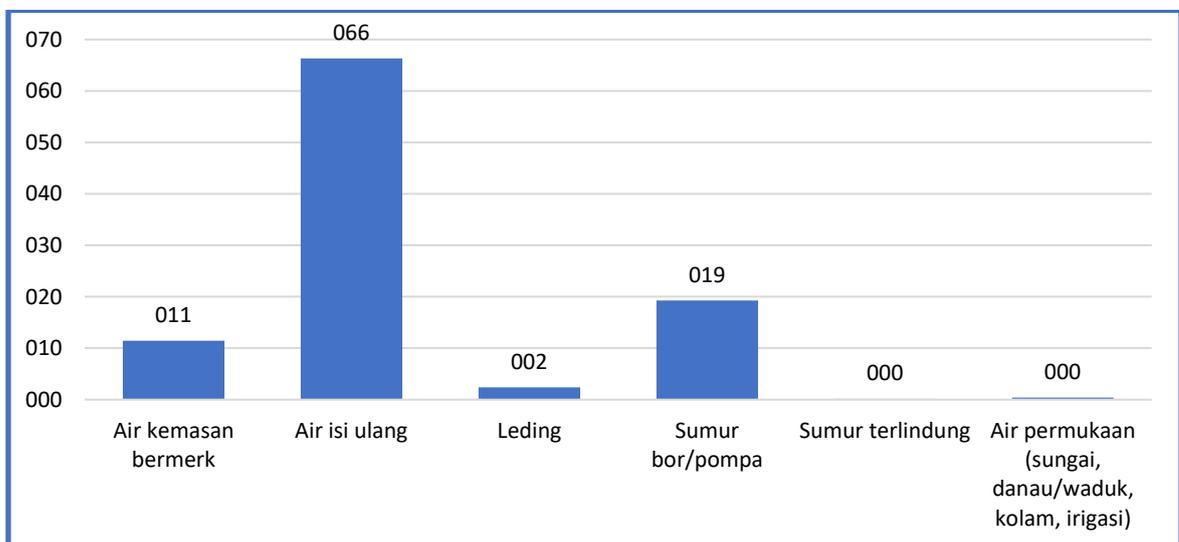
Kuintil Pengeluaran	Luas Lantai Rumah Per Kapita			Total
	<= 7,2	7,3-9,9	10+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kuintil 1 (Q1)</b>	38,25	24,22	37,52	100,00
<b>Kuintil 2 (Q2)</b>	18,29	15,89	65,82	100,00
<b>Kuintil 3 (Q3)</b>	9,98	15,22	74,80	100,00
<b>Kuintil 4 (Q4)</b>	1,55	11,01	87,44	100,00
<b>Kuintil 5 (Q5)</b>	1,28	2,30	96,42	100,00
<b>Total</b>	11,71	12,26	76,04	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Berdasarkan Tabel 6.3 dapat dilihat bahwa 76,04 persen rumah tangga di Kota Palangka Raya memiliki luas lantai lebih dari 10 m<sup>2</sup> perkapita. Rumah tangga dengan

luas lantai perkapita 7,3-9,9 m<sup>2</sup> yaitu sebesar 12,26 persen, sedangkan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari sama dengan 7,2 m<sup>2</sup> yaitu sebesar 11,71 persen.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, baik digunakan sebagai memasak, mandi, mencuci atau yang lainnya. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Ketika kebutuhan air bersih tidak mencukupi, masalah-masalah yang mengganggu kehidupan akan muncul terutama pada aspek kesehatan. Di Indonesia, kekurangan air bersih justru kerap kali terjadi. Masyarakat di daerah kekurangan air bersih seringkali terjangkit penyakit yang menyerang kulit, pencernaan, dan organ lain yang bahkan memicu kematian.



**Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Berdasarkan Gambar 6.4 dapat dilihat bahwa secara umum masyarakat Kota Palangka Raya menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber air minumnya. Hal ini sangat wajar, mengingat makin maraknya usaha air minum isi ulang di Kota Palangka Raya. Persentase penggunaan air minum isi ulang sebagai sumber air minum utama adalah sebesar 66,32 persen. Kemudian untuk penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum adalah sebesar 19,28 persen. Selain air minum isi ulang dan sumur

bor/pompa, penduduk Kota Palangka Raya yang menggunakan air minum kemasan bermerk sebagai sumber air minum sebesar 11,43 persen. Sebanyak 2,38 persen rumah tangga menggunakan leding meteran sebagai sumber air minum, sebesar 0,41 persen menggunakan air sungai, dan rumah tangga pengguna sumur terlindung sebanyak 0,41 persen.

Tempat buang air besar (jamban) dalam sebuah perumahan merupakan salah satu fasilitas yang cukup penting. Fasilitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan adalah jamban/kakus dengan tangki septik. Keadaan jamban keluarga sangat erat hubungannya dengan kesehatan keluarga itu sendiri. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang telah menggunakan fasilitas buang air besar sendiri sudah cukup besar, yaitu 91,66 persen. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air secara bersama dan umum masing-masing sebesar 6,58 persen dan 1,46 persen. Hanya sekitar 0,30 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas jamban.

**Tabel 6.4 Persentase Perumahan Berdasarkan Fasilitas Jamban di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Kuantil 1 (Q1)	Kuantil 2 (Q2)	Kuantil 3 (Q3)	Kuantil 4 (Q4)	Kuantil 5 (Q5)	Total
Ada, digunakan hanya ART sendiri	83,80	87,48	97,20	95,00	92,71	91,66
Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu	12,64	8,15	1,63	3,91	7,29	6,58
Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan	2,50	3,60	1,17	1,09	0,00	1,46
Tidak ada fasilitas	1,06	0,76	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Berdasarkan Tabel 6.5, dapat dilihat bahwa untuk jenis jamban yang digunakan mayoritas rumah tangga di Kota Palangka Raya adalah jamban leher angsa yaitu sebesar 96,27 persen. Untuk jenis kloset plengsengan, sebanyak 0,53 persen rumah tangga di Kota Palangka Raya masih menggunakan kloset tersebut. Sementara

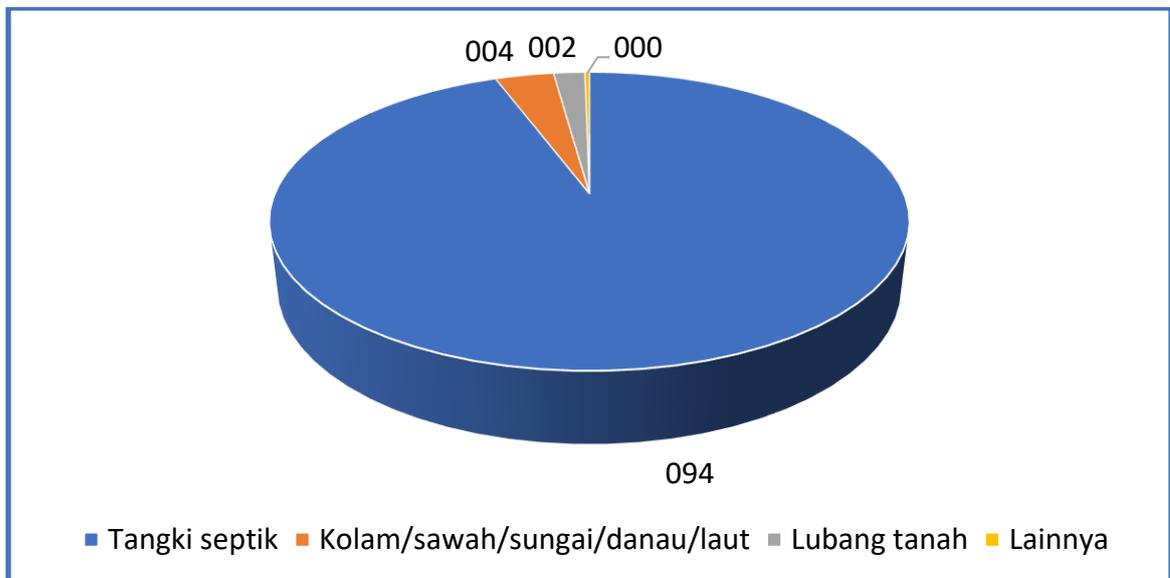
sebagian kecil rumah tangga masih menggunakan cemplung/cubluk sebanyak 3,20 persen.

**Tabel 6.5 Persentase Perumahan Berdasarkan Jenis Kloset Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Jenis Kloset	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Leher angsa	96,27
Plengsengan dengan tutup	0,53
Cemplung cubluk	3,20
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja mencapai 94,30 persen. Rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja di sungai sebesar 3,53 persen, di lubang tanah sebesar 1,89 persen dan di tempat lainnya sebesar 0,28 persen. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.5.



**Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2017**

**Tabel 6.6 Persentase Perumahan Berdasarkan Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Bahan Bakar Utama Memasak	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Listrik	1,03
Elpiji	79,72
Minyak Tanah	17,64
Kayu Bakar	1,61
Lainnya	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Kebutuhan bahan bakar atau energi sekarang ini boleh dikatakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh semua rumah tangga, salah satunya untuk memasak. Bahan bakar utama yang digunakan sebagian besar rumah tangga adalah elpiji, mencapai 79,72 persen. Bahan bakar lain yang digunakan di antaranya minyak tanah sebesar 17,64 persen, kayu bakar sebesar 1,61 persen, dan listrik sebesar 1,03 persen.

**Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Aset di Kota Palangka Raya Tahun 2017**

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset
(1)	(2)
Tabung gas 5,5 kg atau lebih	21,82
Lemari es/kulkas	73,80
AC/Pemanas air	24,72
Emas/perhiasan (minimal 10 gram)	31,15
Sepeda motor	90,12
Perahu/perahu motor	3,25
Mobil	24,07
Televisi layar datar (minimal 30 inci)	27,69

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

### **6.3 Kepemilikan Aset**

Rumah tangga yang sejahtera biasanya memiliki beberapa aset yang digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Tabel 6.7 menunjukkan beberapa jenis aset beserta persentase rumah tangga di Kota Palangka Raya yang memilikinya. Aset yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga adalah sepeda motor, yaitu mencapai 90,12 persen. Mobilitas tinggi penduduk menuntut hampir setiap rumah tangga untuk memiliki sepeda motor. Beberapa aset yang cukup banyak dimiliki oleh rumah tangga adalah lemari es (73,80 persen) dan emas/perhiasan (31,15 persen).

**BAB VII**  
**PENGELUARAN KONSUMSI DAN KEMISKINAN**

**7.1 Pengeluaran Konsumsi**

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan, selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

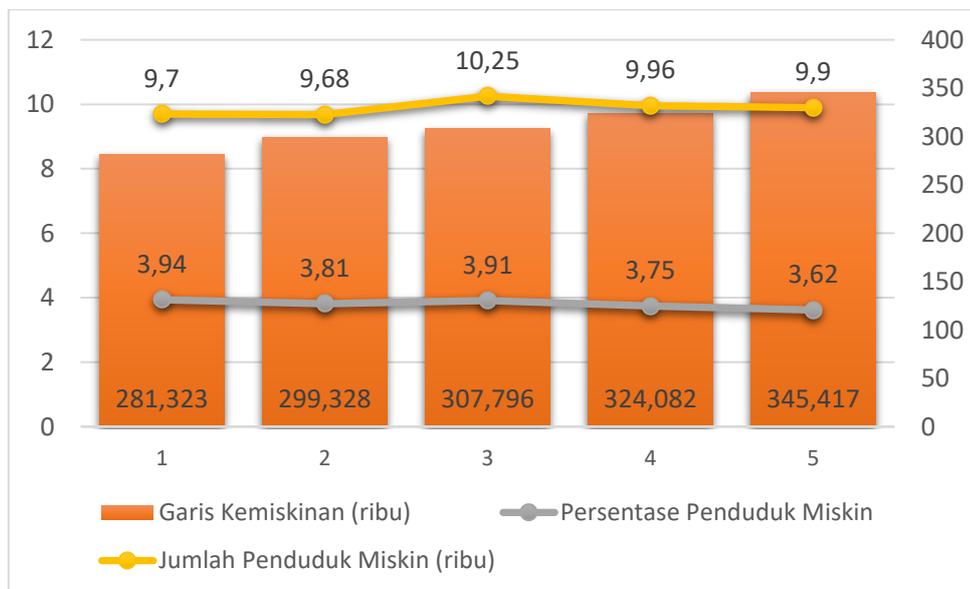
**Tabel 7.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kuantil Pengeluaran, Tahun 2017**

Jenis Pengeluaran	Kuantil Pengeluaran Perkapita Sebulan					Rata-rata
	Kuantil 1	Kuantil 2	Kuantil 3	Kuantil 4	Kuantil 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Makanan</b>	333 676	489 565	662 139	842 803	1 203 194	706 319
<b>Bukan Makanan</b>	197 675	331 019	560 302	950 449	2 313 470	870 415
<b>Total</b>	531 352	820 584	1 222 441	1 793 253	3 516 664	1 576 734

Pada kuintil 1, 2 dan 3 pengeluaran perkapita penduduk sebulan menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk pada ketiga golongan ini lebih banyak digunakan untuk pengeluaran makanan. Pola pengeluaran masyarakat menengah ke bawah ini, dari pendapatan yang mereka hasilkan, lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pola pengeluaran berbeda untuk golongan kuintil 4 dan 5, pendapatan mereka di golongan ini telah dapat memenuhi kebutuhan makanan dan juga dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan bukan makanan.

## 7.2 Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi dan bahkan setiap orang mampu memberikan pendapatnya sendiri tentang siapa saja yang dianggap miskin (subjektif). Namun demikian, diperlukan suatu indikator dengan ukuran yang jelas, konsisten dan diakui sehingga kemiskinan suatu wilayah dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*), baik makanan maupun non makanan, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Acuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan minuman makanan adalah besarnya rupiah per bulan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan dasar setara 2.100 kilo kalori per hari (FAO dan WHO). Kebutuhan dasar non makanan meliputi konsumsi perumahan, pendidikan pakaian, kesehatan serta konsumsi barang/jasa lainnya. Seseorang disebut miskin apabila pengeluaran per bulan untuk konsumsi berada di bawah garis kemiskinan. Setelah melalui beberapa penyempurnaan, sejak tahun 1998 dalam penghitungan kemiskinan melibatkan 52 jenis komoditi makanan dan 51 jenis komoditi bukan makanan di perkotaan serta 47 jenis komoditi bukan makanan di pedesaan.



**Gambar 7.1** Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Garis kemiskinan selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di masyarakat (inflasi). Meskipun demikian, tren persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian tumbuh cukup baik. Kenaikan harga barang dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat.

Bank Dunia menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi tantangan tersendiri setelah menyentuh angka satu digit atau dalam istilah disebut dengan *last mile problem*. Tingkat kemiskinan yang rendah tersebut merupakan kelompok kerak kemiskinan. Kelompok tersebut memiliki karakteristik kepemilikan aset yang rendah, pendidikan rendah, kondisi kesehatan yang rentan, kualitas sumber daya manusia yang tidak kompetitif, dan karakteristik pekerjaan di sektor yang kurang produktif.